

## **Pengertian, Ruang Lingkup, dan Proses Kebijakan Pendidikan**

Saharudin<sup>1</sup>, Lubna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Pekanbaru, 22190614674@students.uin-suska.ac.id

### **Abstract**

This study aims to analyze the definition, scope and process of education policy. In this research, the writer uses a type of library research, namely a series of activities related to library data collection methods to obtain information data by collecting information related to the definition, scope and process of educational policy. Data sources in this research are primary data sources and secondary data sources such as books, articles, etc. The results of the research in this study are: A professional organization is an organization founded by two or more people who have the same profession to achieve a common goal. While the definition of organizational structure is a formal system that seeks to harmonize the relationship between sections and sub-sections in grouping and division of tasks, delegation of authority, coordination based on tasks and hierarchies. Educator Professional Organizations include: Indonesian Teachers Association (PGRI), Indonesian Lecturer Association (ADI), Indonesian Guidance and Counseling Association (ABKIN), Indonesian Education Graduate Association (ISPI). While the Education Personnel Organization is the Association of Indonesian Librarians (IPI).

**Keywords:** Scope, Proses, Policy

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pengertian, Ruang Lingkup dan proses Kebijakan pendidikan. Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka untuk mendapatkan data informasi dengan menghimpun informasi yang berkaitan dengan Pengertian, Ruang Lingkup dan proses Kebijakan pendidikan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder seperti buku, artikel, dll. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu: Organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Pengertian Struktur Organisasi merupakan suatu sistem formal yang berusaha menyelaraskan hubungan antar bagian maupun sub bagian dalam pengelompokan dan pembagian tugas, pendelegasian wewenang, koordinasi yang berdasarkan pada tugas serta hierarki. Organisasi Profesi Pendidik meliputi: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Sedangkan Organisasi Tenaga Kependidikan yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

**Kata kunci:** Ruang Lingkup, Proses, Kebijakan

Copyright (c) 2023 Saharudin, Lubna

Corresponding author: Saharudin

Email Address: 22190614674@students.uin-suska.ac.id (Jl. HR. Soebrantas, Simp. Baru, Kota Pekanbaru, Riau)

Received 18 January 2023, Accepted 24 January 2023, Published 27 January 2023

## **PENDAHULUAN**

Istilah kebijakan merupakan salah satu istilah yang sudah tidak asing lagi ditelinga setiap orang terlebih orang-orang yang notabeneanya berada didalam intasni perusahaan, institusi dan lembaga pendidikan. Banyak para Ahli dan Akademisi turut mengemukakan hasil pemikiran mereka terkait dengan Kebijakan, sebagai dijelaSKAN (Koontz, Harold, Cyril O'Donnell, 1984) yang mengemukakan kebijakan (*policy*) adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan.

Kebijakan itu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (William N. Dunn, 2004). Pakar lainnya kebijakan merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (solichin, 1997).

Dalam konteks lain dijelaskan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur sistem operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitif diantara sistem (Sagala, 2013). Sehingga kebijakan juga bisa diterjemahkan sebagai suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas–aktivitas tertentu atau suatu rencana (Wahab, 1997).

Kebijakan berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota. Kebijakan berhubungan dengan ide mengenai pengelolaan organisasi (Kiwang et al, 2014). Lebih lanjut kebijakan merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga (pemerintah) dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani and Ramdhani, 2017). Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum (Nasarudin, 2016).

Kebijakan yang mengatur tentang sistem pendidikan disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Junaid, 2016). Pencapaian tujuan pendidikan berkaitan dengan faktor-faktor yang saling berhubungan diantaranya yaitu faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor tujuan pendidikan, faktor alat pendidikan dan faktor lingkungan (Dewi, 2016).

Kebijakan dan pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, pendidikan akan selalu ada kaitannya dengan kebijakn-kebijakan baik yang dikeluarkan oleh pimpinan. Dan seorang pemimpin haruslah memiliki prinsip profesionalisme.

Profesionalisme merupakan tuntutan bagi para pekerja yang bekerja di suatu instansi, perusahaan atau institusi lembaga pendidikan yang telah diakui sebagai profesi. Dengan tuntutan yang semakin meluas, banyak orang mengharapkan semua pekerjaan harus bertindak atau bekerja secara profesionalisme padahal masih banyak orang kurang paham apa yang dimaksud dengan profesionalisme. Dalam bahasa awam pula, seseorang disebut profesional jika kerjanya baik, cekatan, dan hasilnya memuaskan.

Sebagai langkah menuju profesionalisme, setiap profesi membentuk organisasi-organisasi yang berfungsi untuk mengayomi, melindungi, dan sebagai keluh kesah pekerja untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi para profesi. Fungsi organisasi profesi ini sangat penting bagi para pekerja.

Dalam keseharian orang awam menganggap bahwa organisasi profesi adalah suatu kumpulan profesi yang terintegrasi dengan baik.

Semakin banyaknya pekerjaan yang diakui sebagai profesi semakin banyak pula dibentuk organisasi profesi. Dengan semakin mudahnya orang-orang berkumpul dalam satu profesi makin mudah pula orang membentuk organisasi profesi baru. Peranan organisasi profesi dapat melindungi pekerja. Supaya mendapat perlindungan dari organisasi profesi, pekerja harus dapat memenuhi kewajiban sebagai profesi. Dengan demikian pekerja akan mendapatkan hak-hak sebagai pekerja. Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi, begitu pun organisasi profesi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang struktur organisasi Lembaga pendidikan dan Organisasi Keprofesian.

## **METODE**

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis tentang menganalisis tentang Pengertian, Ruang Lingkup dan proses Kebijakan pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011). Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata atau citra (Azwar, 2009). Dalam penelitian *kepustakaan (library research)* ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya (Azwar, 2009). Dengan kata lain, data sekunder adalah data pendukung dari data utama atau data primer. Data sekunder dari penelitian ini diambil dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dll.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Struktur Lembaga Pendidikan dan Organisasi Profesi***

#### **Pengertian Struktur Organisasi**

Pengertian tentang struktur organisasi dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Robbins dan Coulter (2007:284), mengatakan struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan.
2. Gibson, dkk (2002:9), mengatakan bahwa struktur organisasi adalah pola formal mengelompokkan orang dan pekerjaan.

3. Wright dkk (1996:188), mengatakan struktur organisasi adalah sebagai bentuk cara di mana tugas dan tanggungjawab dialokasikan kepada individu, di mana individu tersebut dikelompokkan ke dalam kantor, departemen, dan divisi. Struktur Organisasi hendaknya selalu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan publik dan lingkungan. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya kinerja organisasi yang efektif dan proses kerja yang cepat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan terhadap atasan dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Struktur organisasi dapat menghindari atau mengurangi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas.

### **Pengertian Organisasi Profesi**

Sebelum membahas terkait organisasi sebaiknya kita mengetahui tentang apa itu organisasi dan profesi itu sendiri. W.J.S. Poerwadarminta (dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia) organisasi yaitu susunan dan aturan dari berbagai bagian (orang dan sebagainya) sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Selanjutnya menurut (Ivancevich, Jhon M, Robert Konopaske, 2013), organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Chester I. Bernard dalam (Gibson James L, James H. Donnelly, 1996), mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa organisasi merupakan suatu perserikatan manusia antara dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat susunan dan aturan serta sistem aktivitas kerja untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya yaitu mengenai profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Adapun karakteristik dari profesi antara lain adalah mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purna waktu), dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Merton dalam mendefinisikan bahwa organisasi profesi adalah organisasi dari praktisi yang menilai/mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi profesional dan mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang mana tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu.

### **Struktur Organisasi Profesi Pendidik**

1. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

PGRI lahir pada 25 November 1945, setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cikal bakal organisasi PGRI adalah diawali dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB)

tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) tahun 1932 (Mursidin, 2009).

## 2. Asosiasi Dosen Indonesia (ADI)

ADI didirikan sebagai organisasi profesi yang beranggotakan para dosen dari Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Berdirinya ADI merupakan wujud tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap bangsa melalui jalur pendidikan formal, dalam hal ini pendidikan tinggi. Sebagai tenaga pengajar dan pendidik, dosen memiliki peran strategis dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan mahasiswanya agar memiliki kompetensi keilmuaan dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam nation and character building.

## 3. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN)

Tahun 2001 terjadi perubahan nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) adalah suatu organisasi profesi yang beranggotakan guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan kualifikasi pendidikan akademik strata satu (S-1) dari Program Studi Bimbingan dan Konseling dan Program Pendidikan Konselor (PPK). Kualifikasi yang dimiliki konselor adalah kemampuan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam ranah layanan pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karir bagi seluruh konseli.

## 4. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)

Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) lahir pada pertengahan tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi kependidikan ini bersifat regional karena berbagai hal menyangkut komunikasi antaranggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai kongresnya yang pertama di Jakarta 17-19 Mei 1984. Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) adalah suatu organisasi profesi di bidang pendidikan di Indonesia. Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, ISPI mempunyai tujuan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna, melalui pengembangan dan penerapan ilmu pendidikan untuk kemajuan dan kepentingan bangsa dan negara.

### **Organisasi Profesi Tenaga Kependidikan**

#### 1. Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)

Usaha pembentukan organisasi pustakawan mulai dirintis pada tahun 1912 dengan dilangsungkannya diskusi pustakawan di Batavia. Namun, usaha itu baru membuahkan hasil pada tahun 1916 dengan terbentuknya *Vereeniging Tot Bevordering Van Het Bibliotheekwezen* di Batavia. Masa pendudukan Jepang, organisasi itu sudah tidak lagi berjalan. Pada tahun 1954 berdiri Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI). Dan akhirnya pada tahun 1956 PAPSI berubah namanya menjadi Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (PAPADI). Tahun 1962 nama organisasi diubah menjadi Asosiasi Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi (APADI). Sementara pada tahun 1969 berdirilah Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia (HPCI).

Untuk menyatukan perhimpunan pustakawan, pada tahun 1973 dilangsungkan kongres pustakawan se-Indonesia di Ciawi.

Hasilnya adalah pembentukan organisasi pustakawan Indonesia yang bernama Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), yang bertujuan untuk:

- a. Menghimpun, menampung, serta menyalurkan aspirasi dan kreasi dari mereka yang berpotensi dalam ilmu pengetahuan dan yang lainnya dan atau bekerja dalam bermacam-macam jenis perpustakaan atau badan-badan lainnya yang ruang lingkungannya berkaitan dengan perpustakaan.
- b. Mengusahakan mereka yang termasuk di atas tempat semestinya di dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu perpustakaan demi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kesejahteraan masyarakat.
- d. Menempatkan ilmu perpustakaan dan ilmu pengetahuan lainnya pada taraf yang semestinya di antara ilmu pengetahuan.

Struktur organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) adalah sebagai berikut: Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) diketuai oleh seorang ketua umum dibantu oleh sekretaris umum dan komisi. Komisi yang ada di IPI yaitu:

- a. Komisi usaha dan kesejahteraan
- b. Komisi penerbitan
- c. Komisi penelitian dan pengembangan

Untuk kegiatan yang menyangkut profesi dibentuk bagian yang disebut bidang. Dalam IPI terdapat bidang sebagai berikut:

- a. Perpustakaan khusus
- b. Perpustakaan umum
- c. Perpustakaan sekolah
- d. Perpustakaan perguruan tinggi

## **KESIMPULAN**

Organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Pengertian Struktur Organisasi merupakan suatu sistem formal yang berusaha menyelaraskan hubungan antar bagian maupun sub bagian dalam pengelompokan dan pembagian tugas, pendelegasian wewenang, koordinasi yang berdasarkan pada tugas serta hierarki.

Organisasi Profesi Pendidik meliputi: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Sedangkan Organisasi Tenaga Kependidikan yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) (Oktaviani, D. A., Pradani, H. N., Watef, L., Revandhika, N. I., Witjaksono, M. K., & Rakhmawati, 2018).

## **REFERENSI**

- Azwar, S. (2009). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Gibson James L, James H. Donnelly, J. M. I. (1996). *ORGANISASI (Prilaku, Struktur, Proses)* (A. Dharma (ed.); 5th ed.). Erlangga.
- Ivancevich, Jhon M, Robert Konopaske, M. T. M. (2013). *Organizational Behavior & Management* (9th ed.). Texas State University.
- Koontz, Harold, Cyril O'Donnell, and H. W. (1984). *Manajemen* (Jilid II). Erlangga.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Mursidin. (2009). *Profesionalisme Guru*. Kanisius.
- Oktaviani, D. A., Pradani, H. N., Watef, L., Revandhika, N. I., Witjaksono, M. K., & Rakhmawati, N. A. (2018). Perkembangan Organisasi Keprofesian Ti Di Indonesia. *Jurnal SITECH: Sistem Informasi Dan Teknologi*, 1(2), 145–154.
- Sagala, S. (2013). *Memahami Organisasi Pendidikan*. ALFABETA.
- solichin, A. W. (1997). *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara* (Ke Dua). Bumi Aksara.